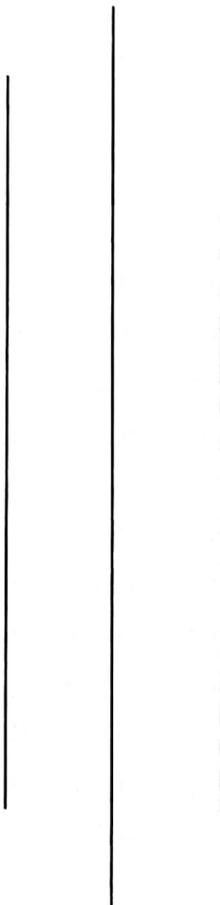




**PERATURAN KALURAHAN NGLERI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN NGLERI KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH NGLERI
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGLERI
NOMOR 6 TAHUN 2023
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGLERI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngleri Nomor 4 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang harus ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah DIY Tahun 2013 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor ... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor ...);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor ...);
20. Peraturan Desa Ngleri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngleri Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Ngleri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ngleri Tahun 2019 Nomor 10);
22. Peraturan Kalurahan Ngleri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngleri Tahun 2020 Nomor 6);

23. Peraturan Kalurahan Ngleri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalurahan Ngleri Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Ngleri Tahun 2022 Nomor 3);
24. Peraturan Kalurahan Ngleri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Ngleri Tahun 2023 Nomor 4);
25. Peraturan Kalurahan Ngleri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngleri Tahun 2023 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLERI

dan

LURAH NGLERI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALURAHAN NGLERI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | : Rp. 1.928.118.800,- |
| 2. Belanja Desa | : <u>Rp. 2.041.650.890,-</u> |
| Surplus/(Defisit) | : (Rp. 113.532.090,- |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. 113.532.090,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : Rp. 0,- |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | : Rp. 113.532.090,- |
| SiLPA Tahun Berkenaan | : - |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal kalurahan

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngléri.

Ditetapkan di Ngléri

pada tanggal 28 Desember 2023



Diundangkan di Ngléri

pada tanggal 28 Desember 2023



LEMBARAN KALURAHAN NGLERI TAHUN 2023 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLERI
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 17.006.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.910.112.800,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1.000.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.928.118.800,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 750.430.188,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 463.920.702,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 786.300.000,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 41.000.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 2.041.650.890,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (113.532.090,00) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 113.532.090,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 113.532.090,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 113.532.090,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

NGLERI WETAN, 28 Desember 2023
 LURAH NGLERI -
 LURAH NGLERI
 SUPARDAL



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLERI
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|--|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 17.006.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.910.112.800,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1.000.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 1.928.118.800,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>928.669.724,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 841.663.124,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 45.510.000,00 | ADD, PBH |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 45.510.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 612.843.000,00 | ADD, PBH |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 612.843.000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 44.392.248,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 44.392.248,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll) | 41.983.816,00 | ADD, DLL, PAD, F |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 41.983.816,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 47.684.940,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 47.684.940,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 4.600.000,00 | ADD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.600.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 16.064.700,00 | ADD |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 16.064.700,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 28.584.420,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 28.584.420,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 9.006.000,00 | |
| 1.2.02 | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 3.906.000,00 | PAD |
| 1.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.906.000,00 | |
| 1.2.94 | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 600.000,00 | PAD |
| 1.2.94 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 600.000,00 | |
| 1.2.95 | | Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja | 4.500.000,00 | PAD |
| 1.2.95 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.500.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | | | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1.300.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 800.000,00 | DDS |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 800.000,00 | |
| 1.3.90 | | Penyusunan Monografi Desa | 500.000,00 | PBH |
| 1.3.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 500.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 73.600.600,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 11.000.000,00 | DDS |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.000.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 5.725.000,00 | DDS |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.725.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll) | 5.050.600,00 | ADD, DDS, PBH |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.050.600,00 | |
| 1.4.05 | | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 3.275.000,00 | DDS |
| 1.4.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.275.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1.500.000,00 | DDS, DLL |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 41.250.000,00 | DDS |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 27.950.000,00 | |
| 1.4.08 | 5.3. | Belanja Modal | 13.300.000,00 | |
| 1.4.90 | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran | 5.800.000,00 | ADD, DLL, PAD, F |
| 1.4.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.800.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 3.100.000,00 | |
| 1.5.94 | | Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB | 3.100.000,00 | PAD |
| 1.5.94 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.100.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>767.250.000,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 112.000.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 9.000.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | |
| 2.1.09 | | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 52.000.000,00 | DDS |
| 2.1.09 | 5.3. | Belanja Modal | 52.000.000,00 | |
| 2.1.90 | | Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa | 51.000.000,00 | DDS |
| 2.1.90 | 5.3. | Belanja Modal | 51.000.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 122.750.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 57.640.000,00 | DDS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 57.640.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 45.440.000,00 | DDS |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 45.440.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.91 | | Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas) | 2.450.000,00 | DDS |
| 2.2.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.450.000,00 | |
| 2.2.98 | | Insentif kader kesehatan/KB | 17.220.000,00 | DDS |
| 2.2.98 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 17.220.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 532.500.000,00 | |
| 2.3.07 | | Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Peltilasan Milik Desa | 4.500.000,00 | DDS |
| 2.3.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.500.000,00 | |
| 2.3.10 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 110.000.000,00 | DDS |
| 2.3.10 | 5.3. | Belanja Modal | 110.000.000,00 | |
| 2.3.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 183.800.000,00 | DDS, PBK |
| 2.3.11 | 5.3. | Belanja Modal | 183.800.000,00 | |
| 2.3.12 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 130.650.000,00 | DDS |
| 2.3.12 | 5.3. | Belanja Modal | 130.650.000,00 | |
| 2.3.14 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 103.550.000,00 | DDS |
| 2.3.14 | 5.3. | Belanja Modal | 103.550.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>227.856.166,00</u> | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 50.000.000,00 | |
| 3.1.93 | | Pembinaan Jaga Warga | 50.000.000,00 | PBP |
| 3.1.93 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 59.875.000,00 | |
| 3.2.01 | | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 25.675.000,00 | DDS |
| 3.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.675.000,00 | |
| 3.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 10.000.000,00 | |
| 3.2.91 | | Pengembangan kehidupan sosial keagamaan | 24.800.000,00 | DDS |
| 3.2.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 24.800.000,00 | |
| 3.2.96 | | Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya | 9.400.000,00 | DDS |
| 3.2.96 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.400.000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 84.780.000,00 | |
| 3.3.05 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 80.000.000,00 | DDS |
| 3.3.05 | 5.3. | Belanja Modal | 80.000.000,00 | |
| 3.3.93 | | Operasional Karang Taruna | 4.780.000,00 | PBH |
| 3.3.93 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.780.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 33.201.166,00 | |
| 3.4.91 | | Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat | 17.900.000,00 | DDS |
| 3.4.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.900.000,00 | |
| 3.4.91 | 5.3. | Belanja Modal | 10.000.000,00 | |
| 3.4.92 | | Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa) | 5.875.000,00 | DDS |
| 3.4.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.875.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.4.95 | | Operasional LPMD dan/atau LPMP | 2.400.000,00 | PAD |
| 3.4.95 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | |
| 3.4.96 | | Operasional PKK | 7.026.166,00 | ADD, PBH |
| 3.4.96 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.026.166,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>76.875.000,00</u> | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 60.175.000,00 | |
| 4.2.06 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 42.000.000,00 | DDS |
| 4.2.06 | 5.3. | Belanja Modal | 42.000.000,00 | |
| 4.2.99 | | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 18.175.000,00 | DDS |
| 4.2.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 18.175.000,00 | |
| 4.3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 12.700.000,00 | |
| 4.3.02 | | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 12.700.000,00 | DDS |
| 4.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.700.000,00 | |
| 4.5. | | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 4.000.000,00 | |
| 4.5.02 | | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 4.000.000,00 | DDS |
| 4.5.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u> | <u>41.000.000,00</u> | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 | |
| 5.1.00 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 | DDS |
| 5.1.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 36.000.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 36.000.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 36.000.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 2.041.650.890,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (113.532.090,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 113.532.090,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTC | 113.532.090,00 | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |



KESEPAKATAN BERSAMA
LURAH DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLERI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) KALURAHAN NGLERI
TAHUN 2024

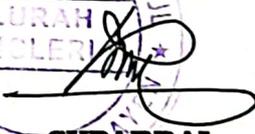
Pada hari ini *Kamis* tanggal *dua puluh delapan* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* bertempat di Balai Kalurahan Ngleri Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul dalam acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Ngleri menyetujui bersama terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kalurahan Ngleri Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah rancangan Peraturan Kalurahan dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat di Ngleri dan ditandatangani bersama oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngleri dan Lurah Ngleri.

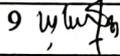
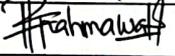

Ketua Bamuskal Ngleri

TAMAM HASYIM


Lurah Ngleri,

SUPARDAL

DAFTAR HADIR

Hari/Tgl : Koneis, 28 Desember 2023
 Tempat : Balai Kelurahan Nglri
 Acara : Pembahasan dan Penetapan Perihal APBDora TA. 2024

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|---------------------------|---|--|
| 1 | Drs. H. Supardal | Lurah | 1  |
| 2 | Yuli Supriyanto, S. Pd. I | Carik | 2  |
| 3 | Wahyudi Cahyono | Jagabaya | 3  |
| 4 | Suwardi, SAP | Ulu-Ulu | 4  |
| 5 | Sujarmono | Kamituwa | 5  |
| 6 | Ahmadi | Danarta | 6  |
| 7 | Dwi Yuswanto, SE | Pangripta | 7  |
| 8 | Nasib Setya | Tata Laksana dan Umum | 8  |
| 9 | Istri Rahayu | Dukuh Ngluweng | 9  |
| 10 | Edy Sumarno | Dukuh Puntuk Kulon | 10  |
| 11 | Sukiyanto | Dukuh Puntuk Wetan | 11  |
| 12 | Partini | Dukuh Nglri Kulon | 12  |
| 13 | Sunarko | Dukuh Nglri Wetan | 13  |
| 14 | Endri Pratiwi | Dukuh Nglri Lor | 14  |
| 15 | Tawikan | Dukuh Wonolagi | 15  |
| 16 | Danang Sumanta | Dukuh Jelok | 16  |
| 17 | Septiana Nur Musito, SE | Staf | 17  |
| 18 | Agus Purwanto | Staf | 18  |
| 19 | Fitri Nur Yusuf | Staf | 19  |
| 20 | Budi Ari Wibowo | Staf | 20  |
| 21 | Mariya Ulfa | Staf | 21  |
| 22 | Drs. H. Tamam Hasyim | Ketua Bamuskal | 22  |
| 23 | Muhsin | Wakil Ketua Bamuskal | 23  |
| 24 | Reny Rahmawati, S.Si | Sekretaris Bamuskal | 24  |
| 25 | Bagong Kriswanto, S. Pd | Kabid. Pemerintahan & Pemberdayaan Masy | 25  |
| 26 | W. Widiyanto | Kabid. Pembangunan & Pemberdayaan Masy | 26  |
| 27 | Sugiyanto | Anggota | 27  |
| 28 | Suroto | Anggota | 28  |

Ketua Bamuskal Nglri,

TAMAM HASYIM

Lurah Nglri,

SUPARDAL